

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
BELANJA DAERAH, DAN IPM TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI
PROVINSI JAWA TIMUR 2011-2015**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh

**RAMADHAN FEBRIANTO
125020100111055**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA DAERAH, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR 2011-2015

Yang disusun oleh:

Nama : Ramadhan Febrianto
NIM : 125020100111055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 Februari 2017.

Malang, 1 Februari 2017

Dosen Pembimbing,

Dr. Iswan Noor, SE., ME.

NIP. 19590710 198303 1 004

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA DAERAH, DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR 2011-2015

Ramadhan Febrianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ramafbr@gmail.com

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi. Hal itu belum terwujud apabila ketimpangan pendapatan antar daerah masih lebar. Melihat kondisi tersebut, Analisa mengenai ketimpangan pendapatan antar daerah perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dipakai yakni data panel, 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama 5 tahun (2011-2015). Alat analisis menggunakan regresi panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur, sedangkan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, IPM

A. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi terdapat dua istilah yang hampir sama namun memiliki definisi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yakni peningkatan output perkapita dalam jangka waktu panjang (Sukirno, 1996). Pembangunan ekonomi merupakan upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat menghasilkan output yang tinggi dan lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk (Todaro, 2004).

Secara lebih spesifik letak perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi dapat diperhatikan dari segi kuantitas dan kualitas. Pertumbuhan ekonomi lebih pada segi kuantitas karena melihat perekonomian melalui peningkatan kapasitas produksi yang kemudian diukur dengan GNP (*Gross National Product*). Contoh sederhana dari pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari peningkatan fisik, seperti peningkatan jumlah serta produksi barang, peningkatan infrastruktur, bertambahnya sekolah dan rumah sakit. Pembangunan ekonomi melihat perekonomian pada sisi kualitas. Dalam artian peningkatan nilai dalam perekonomian diikuti juga oleh perkembangan kesejahteraan penduduk.

Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang turut meningkatkan nilai sosial. Seperti yang telah disampaikan oleh Todaro bahwasannya pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan, memberantas kemiskinan serta ketimpangan. Todaro bersama Smith juga mengungkapkan kemiskinan yang meluas serta tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan (Todaro, 2004). Dundley Sears juga menyampaikan tujuan pembangunan yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Sudantoko, 2009).

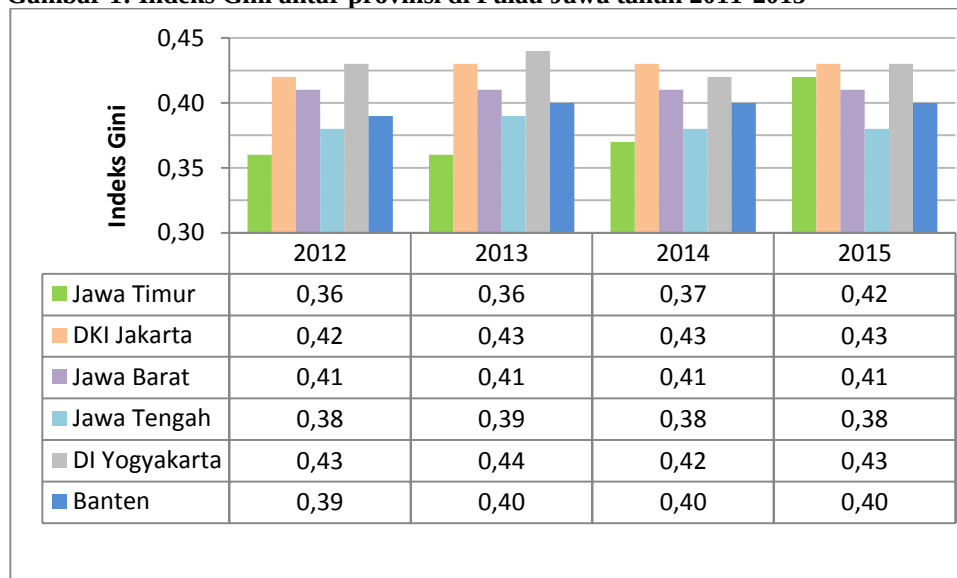
Pada negara berkembang seperti Indonesia seringkali terjadi semacam *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan. Dimana ketika pemerintah menginginkan peningkatan salah satu indikator ekonomi, akan mengganggu indikator ekonomi lainnya. Dan juga antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan hampir selalu sulit untuk diwujudkan bersamaan terutama dalam negara berkembang. Seperti yang telah disampaikan oleh Syahrir (dalam Kuncoro, 2003), bahwasannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi melampaui negara-

negara maju pada tahap awal pembangunan memang dapat dicapai namun turut diiringi dengan masalah lain seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan ketidakseimbangan struktural.

Berdasarkan data dari World Bank (2015), ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Salah satunya dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun di Indonesia, yang telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Namun, pertumbuhan selama satu dasawarsa terakhir hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen populasi sisanya, sekitar 205 juta orang tertinggal di belakang.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk yang cukup banyak diantara pulau lainnya dan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut BPS, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil.

Gambar 1: Indeks Gini antar provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2015

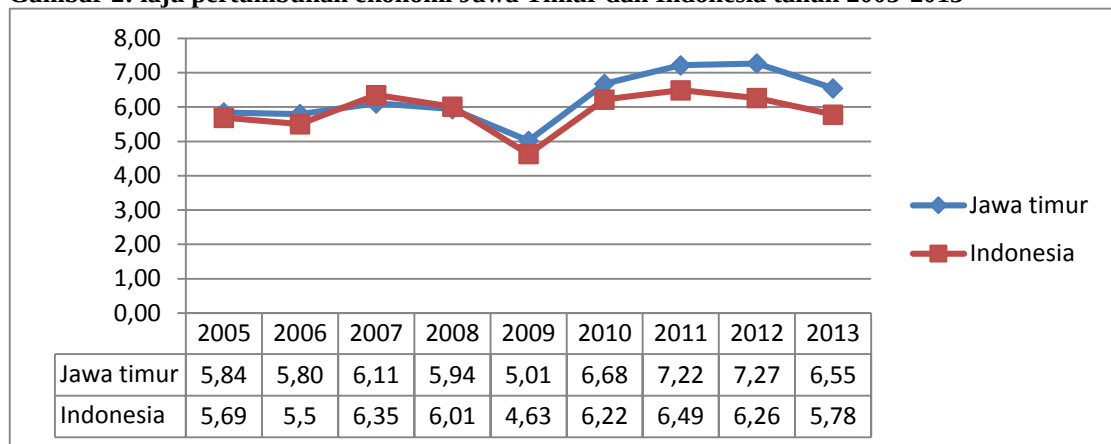


Sumber : BPS pusat, data diolah (2016)

Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat tren Indeks Gini antar provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia selalu menempati urutan pertama dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Jawa, kecuali tahun 2013 berada di bawah Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 0,44. Hal yang menarik perhatian penulis dari tren Indeks Gini di Pulau Jawa yakni ketimpangan pendapatan pada masing-masing provinsi cenderung stabil tiap tahun, kecuali Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Berbeda dengan Indeks Gini pada DI Yogyakarta yang fluktuatif, Jawa Timur selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2013. Bahkan pada tahun 2015 kenaikannya hampir 14%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami fluktuasi pada tahun 2005-2013, begitu juga dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi Jawa Timur selalu mengungguli laju pertumbuhan Nasional sejak tahun 2005, kecuali tahun 2007 dan 2008 (gambar 2). bahkan pada tahun 2012 mencapai angka 7,27, jauh dari pertumbuhan ekonomi Nasional dengan angka 6,26.

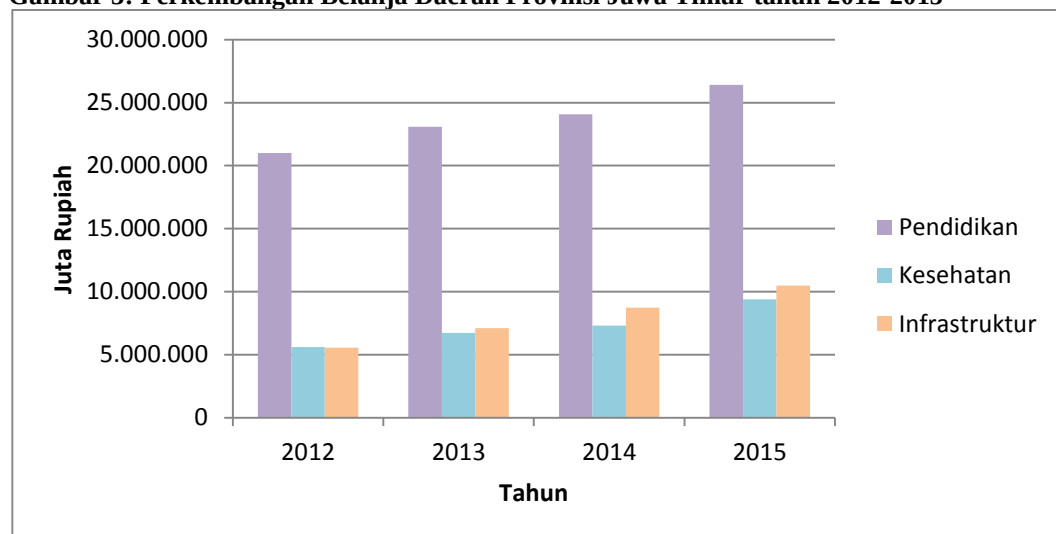
Gambar 2: laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2005-2013



Sumber : BPS pusat, data diolah (2016)

Tingginya tingkat PDRB serta laju pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan oleh Jawa Timur tidak serta merta menunjukkan pembangunan ekonomi yang positif pula. Dimana untuk mencapai pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakatnya, diharapkan dapat mengentaskan masalah-masalah perekonomian yakni kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan. Kondisi ketimpangan di Jawa Timur yang semakin meningkat tidak relevan dengan angka PDRB yang tinggi dan juga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Gambar 3: Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016)

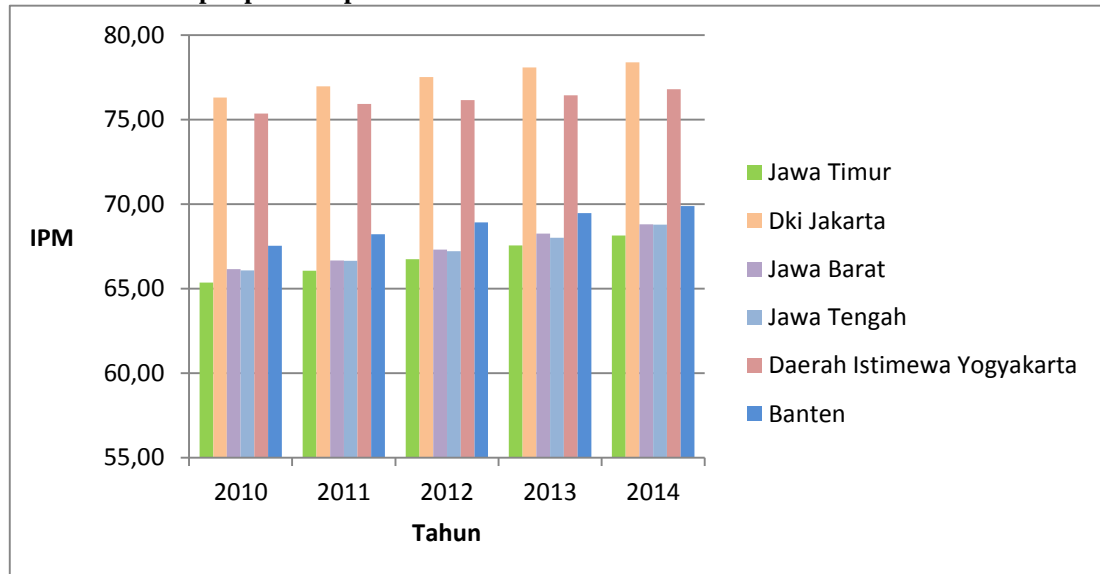
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah dalam menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan. APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah) dalam satu periode tertentu. Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Selain itu APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Mardiasmo, 2002). Gambar 3 menunjukkan belanja daerah Jawa Timur pada 3 bidang, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja daerah pada bidang pendidikan selalu paling tinggi tiap tahunnya, disusul infrastruktur dan kesehatan. Peningkatan belanja daerah di bidang pendidikan terlihat pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi. Hal itu menandakan pemerintah daerah masih memprioritaskan pendidikan sebagai upaya pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Belanja daerah di bidang kesehatan juga terlihat selalu naik tiap tahunnya. Sama halnya dengan pendidikan, pada tahun 2015 peningkatan cukup tinggi mencapai 28%. Dalam hal ini

pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pembangunan ekonomi pada akhirnya dapat tercipta. Karena pembangunan ekonomi sejatinya tidak hanya melihat laju pertumbuhan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sumber daya manusia serta distribusi pendapatan yang merata

Hal terakhir mengapa Jawa Timur menjadi objek penelitian penulis berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dari BPS menampilkan Provinsi Jawa Timur memiliki nilai IPM terendah se pulau Jawa sejak tahun 2010 (gambar 4). IPM yang terdiri tiga indikator utama dalam pembangunan manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan layak, belum pada tingkatan yang maksimal pada Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Gambar 4: IPM per provinsi pada Pulau Jawa tahun 2010-2014



sumber : BPS, data diolah (2016)

Berdasarkan fenomena yang ada di Jawa Timur, penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Timur?

B. KAJIAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah

Ketimpangan distribusi pendapatan cenderung terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin diikuti pula oleh kemiskinan. Namun ketika negara-negara miskin tersebut sudah semakin berkembang bahkan maju maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (Kuznets dalam Kuncoro, 2006). Penjelasan Kuznets dijabarkan sebagai berikut, disparitas dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, kemudian ketika mencapai tahap lebih lanjut dari pembangunan, pembagian pendapatan menjadi lebih kecil. Dengan kata lain proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menjadi pemerataan pembagian pendapatan kembali meningkat pada tahap pembangunan lebih lanjut. Kuznets menggambarkan dalam bentuk kurva yang masih hingga saat ini dikenal sebagai kurva Kuznets. Kurva Kuznets berbentuk U terbalik dan menggambarkan hubungan antara pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Dalam jangka pendek terdapat korelasi

positif antara pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun dalam jangka panjang keduanya menjadi korelasi negatif.

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat juga diketahui dengan menggunakan Indeks Williamson atau indeks ketimpangan regional (*regional inequality*).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Di mana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = jumlah penduduk daerah i

n = jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

Pertumbuhan Ekonomi

Ahli-ahli ekonomi klasik, di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan ingin mengetahui tentang sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan corak proses pertumbuhannya. Menurut pandangan klasik ada tiga syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian dalam hidupan ekonomi dan kesejahteraan umum (*economic harmony and general welfare*) yaitu spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas (Arsyad, 2010).

Menurut teori Neo-Klasik yang diungkapkan oleh Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan.

Menurut Teori Solow-Swan, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika modal yang digunakan lebih banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu (Arsyad, 2010)

Teori pertumbuhan endogen biasa juga disebut sebagai teori pertumbuhan baru (*new growth theory*) memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Teori-teori pertumbuhan sebelumnya umumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Modal yang dimaksud juga terbatas hanya dari investasi yang didapat dari tabungan. Sedangkan dalam teori pertumbuhan endogen pengertian modal bersifat lebih luas, bukan hanya sekedar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (*human capital*). Model pertumbuhan endogen mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan yang berasal dari dalam (*endogeneous*) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan (Arsyad, 2010).

Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom neo klasik mengemukakan, dalam tahap awal pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar daerah cenderung berkurang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura. Kelompok neoklasik optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Tirmidzi, 2012).

Kuznets melalui penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan

mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan di berbagai negara.

Ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan (Syafrizal, 2008).

Belanja Daerah

Pemikiran Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat atau disebut dengan *Gesetz Des Wachsendenstaats Und Bedarf* (hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah). Inti dari teori ini adalah semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya (Soepangat & Haposan, 1991).

Adolf Wagner juga menjelaskan bahwa yang semakin meningkat tersebut adalah kegiatan dan kebutuhan negara yang mempunyai kaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah termasuk pengeluaran pemerintah. Terdapat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, diantaranya meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan (Prasetya, 2012)

Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah dan Belanja Daerah

Peran pemerintah dalam perekonomian dapat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dirancang untuk mengarahkan distribusi pendapatan yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan belanja daerah. Peranan kebijakan fiskal melalui distribusi pendapatan terdiri dari usaha dalam menaikkan pendapatan riil masyarakat dan mengurangi pendapatan yang lebih tinggi melalui belanja daerah. Apabila hal itu dapat dikelola dengan benar dan seimbang dalam berbagai sektor, maka ketimpangan pendapatan secara berhatap dapat dikurangi (Jinghan, 1996).

Belanja daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Alokasi belanja daerah pada bidang tersebut perlu disertai dengan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatannya. Peningkatan anggaran belanja dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu contoh aspek penting dalam upaya mengurangi ketimpangan (Gunadi, 2005).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakikat tujuan pembangunan (Kuncoro, 2006). Salah satu indikator yang populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Todaro dan Smith, IPM mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi). Indikator IPM terdiri dari Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Kehidupan yang Layak. Berdasarkan BPS, IPM metode baru tahun 2010 dibagi menjadi variabel di bawah ini:

1. Kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir
2. Pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
 - a. Rata-rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

- b. Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah data digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah dan IPM

Becker (2007) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tiap penduduk dapat ditunjang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran terhadap masalah, maka penulis menjabarkan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Timur.
2. Diduga belanja daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Timur.
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Timur.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*). Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section* (Kuncoro, 2007). Data *time series* berupa tahun 2011-2015, data *cross section* berupa 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan memakai data sekunder. Terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen dalam penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian yakni ketimpangan pendapatan antar daerah. Sedangkan variabel independennya yakni pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persamaan model regresi data panel penelitian ini dapat dirumuskan dalam model berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	ketimpangan pendapatan antar daerah (indeks dengan angka 1-10)
i	=	kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur
t	=	waktu
α	=	konstanta
β_1 - β_3	=	koefisien
X1	=	pertumbuhan ekonomi (persen)
X2	=	belanja daerah (juta rupiah)
X3	=	IPM (indeks dengan angka 1-10)

Adapun jenis pendekatan regresi data panel ada 3 yakni *Common Effect Method* (CEM), *Fixed Effect Method* (FEM), *Random Effect Method* (REM). Teknik pengujian yang dipakai dalam uji signifikansi model yakni Uji Hausmann dengan menggunakan *correlated random effect*. Dalam uji Hausmann, nilai yang dilihat yakni pada *cross section random*, maka hipotesis yang dibuat adalah H0: termasuk *Fixed Effect Model*, karena nilai *cross section random* > derajat signifikansi (α) sebesar 5%, dan H1: termasuk *Random Effect Model* karena nilai *cross section random* < derajat signifikansi (α).

Uji Chow, yakni uji yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *Fixed Effect model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM). Uji Chow menggunakan *redundant fixed effect test* dengan melihat besarnya *cross section F*. hipotesisnya adalah H0: termasuk *Common Effect Model* karena nilai *cross section F* > derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%, dan H1: termasuk *Fixed Effect model* karena nilai *cross section F* < derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%

Koefisien determinasi (R²) yang ditunjukkan dari hasil regresi pada intinya untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (x) dalam menjelaskan variabel dependen (y). Ukuran atau besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan (R²), dengan nilai berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai R² semakin mendekati satu (1), maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F digunakan untuk menunjukkan uji secara simultan atau keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%. Kriteria pengujiannya apabila nilai F-statistik < Prob (F-statistik) artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-statistik > Prob (F-statistik) artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana H0: nilai F-statistik < Prob(F-statistik), dan H1: F-statistik > Prob(F-statistik).

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t-statistik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji signifikansi model memiliki tujuan untuk menentukan mana model yang lebih baik digunakan, antara *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM), atau *Common Effect Model* (CEM). Teknik pengujian yang dipakai dalam uji signifikansi model tersebut yakni Uji Hausmann dengan menggunakan *correlated random effect*. Dalam uji Hausmann, nilai yang dilihat yakni pada *cross section random*, maka hipotesis yang dibuat adalah H0: termasuk *Fixed Effect Model*, karena nilai *cross section random* > derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%, dan H1: termasuk *Random Effect Model* karena nilai *cross section random* < derajat signifikansi (alpha).

Gambar 5: Hasil Uji Hausmann

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DAERAH

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.606359	3	0.4564

Sumber: Eviews 7 (2017)

Dari hasil output untuk uji Hausmann pada model didapati bahwa H0 diterima dan H1 ditolak (gambar 5), karena besarnya nilai cross-section random 0.4564 > derajat signifikansi (alpha) sebesar 5% atau 0.05. Sehingga model yang terbaik berdasarkan Uji Hausmann yakni *Fixed Effect model* (FEM).

Uji selanjutnya menggunakan uji Chow, yakni uji yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *Fixed Effect model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM). Uji Chow menggunakan *redundant fixed effect test* dengan melihat besarnya *cross section F*. hipotesisnya adalah H0: termasuk *Common Effect Model* karena nilai *cross section F* > derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%, dan H1: termasuk *Fixed Effect model* karena nilai *cross section F* < derajat signifikansi (alpha) sebesar 5%

Gambar 6: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: DAERAH

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	273.654952	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	804.355140	37	0.0000

Sumber: evIEWS 7 (2017)

Dari hasil output untuk Uji Chow pada model didapati bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima (gambar 6), karena besarnya nilai *cross section F* < derajat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Sehingga model yang terbaik berdasarkan Uji Chow yakni *Fixed Effect model* (FEM). Setelah melihat hasil Uji Hausmann dan Uji Chow, maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect model* (FEM).

Gambar 7: Hasil Uji Regresi

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/07/17 Time: 21:56

Sample: 2011 2015

Included observations: 5

Cross-sections included: 38

Total pool (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.709543	3.086845	2.497548	0.0136
X1	0.194833	0.044644	4.364152	0.0000
X2	0.501953	0.145804	3.442652	0.0007
X3	-4.772560	2.093786	-2.279392	0.0241

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985661	Mean dependent var	2.199893
Adjusted R-squared	0.981811	S.D. dependent var	0.664994
S.E. of regression	0.089685	Akaike info criterion	-1.796534
Sum squared resid	1.198456	Schwarz criterion	-1.095861
Log likelihood	211.6708	Hannan-Quinn criter.	-1.512702
F-statistic	256.0524	Durbin-Watson stat	2.713272
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: EvIEWS 7 (2017)

Hasil regresi pada model menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.985661 atau 98% (gambar 7). Artinya besarnya pengaruh variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan IPM secara keseluruhan sebesar 98% terhadap variabel dependen yakni ketimpangan pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dari hasil regresi yang ditunjukkan oleh gambar 7, menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 256.0524 dan Prob(F-statistik) sebesar 0. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima karena F-statistik > Prob(F-statistik). Artinya, seluruh variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan IPM berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yakni ketimpangan pendapatan.

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t-statistik adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = 0.194833 \cdot X1_{it} + 0.501953 \cdot X2_{it} - 4.772560 \cdot X3_{it} - 7.709543 + \varepsilon$$

Hasil regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X1) diketahui jika H_0 : nilai probabilitas > derajat signifikansi (α), dan H_1 : nilai probabilitas < derajat signifikansi (α).

Dapat dilihat dari hasil regresi bahwa nilai probabilitas pada variabel X1 sebesar 0, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y). Nilai koefisien dari X1 sebesar 0,19, artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan daerah sebesar 0,19 %. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis dimana hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan (Y).

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuznets (dalam Kuncoro, 2006) melalui kurva U terbalik, yakni kurva yang menghubungkan antara indeks gini dengan pendapatan per kapita. Penjelasan dari kurva U terbalik dari Kuznet bahwa ketimpangan pada tahap awal pembangunan akan ikut melebar sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun ketika tahap pembangunan tercapai, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur belum melewati titik tertinggi kurva pada sumbu vertikal (Indeks Gini) atau titik kulminasi, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi masih dalam tahap turut meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hasil regresi untuk variabel belanja daerah (X2) diketahui jika H0: nilai probabilitas > derajat signifikansi (alpha), dan H1: nilai probabilitas < derajat signifikansi (alpha). Dapat dilihat dari hasil regresi bahwa nilai probabilitas pada variabel X2 sebesar 0, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel belanja daerah (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y). Nilai koefisien dari X2 sebesar 0,501, artinya ketika belanja daerah meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan daerah sebesar 0,501 %. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkacem Laabasyang (2004) yang menunjukkan hubungan positif antara belanja daerah dengan ketimpangan pendapatan antar daerah. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui belanja daerah. Belanja daerah baiknya disalurkan dengan alokasi yang sesuai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keadaan realisasi belanja daerah di Jawa Timur yang memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan menunjukkan belum tercapainya tujuan tersebut. Alokasi belanja daerah belum dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga peningkatan belanja daerah yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru dapat memperlebar distribusi pendapatan karena alokasi yang kurang tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Adolf Wagner (dalam Mangkoesoebroto, 1993). Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menjadi salah satu alat ukur dalam menghitung Indeks Williamson. Dalam hal ini, penulis menggunakan Indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pada akhirnya, peningkatan belanja daerah pada tiap kabupaten/kota di Jawa Timur dapat memicu kenaikan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

Hasil regresi untuk variabel IPM (X3) diketahui jika H0: nilai probabilitas > derajat signifikansi (alpha), dan H1: nilai probabilitas < derajat signifikansi (alpha). Dapat dilihat dari hasil regresi bahwa nilai probabilitas pada variabel X3 sebesar 0, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel IPM (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y). Nilai koefisien dari X3 sebesar -4,77, artinya ketika IPM meningkat 1% maka akan diikuti penurunan ketimpangan pendapatan daerah sebesar 4,77 %. Hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang signifikan serta hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan pendapatan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Todaro (2002). Pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian dari IPM tidak hanya menjadi output pembangunan, melainkan juga sebagai input. Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat dikatakan sebagai bentuk investasi. Todaro juga menjelaskan bahwa aliran pendapatan yang lebih tinggi di masa akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Pendekatan dasar modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan.

Sukirno (2002) menjabarkan mengenai peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat pada daerah tertinggal memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat menguasai teknologi modern. Teknologi nantinya berguna dalam hal peningkatan produktivitas atau efisiensi produksi. Serta teknologi masih dianggap sebagai salah satu faktor

produksi, selain tenaga kerja dan modal. Tercapainya efisiensi produksi tentu saja juga menguntungkan daerah yang menjadi lokasi produksi. Pendapatan per kapita meningkat sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan mengurangi ketimpangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertumbuhan Ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh dalam meningkatkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuznets melalui kurva U terbalik, dimana ketimpangan pada tahap awal pembangunan akan ikut melebar sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun ketika tahap pembangunan tercapai, ketimpangan akan menurun.

Belanja daerah memiliki pengaruh dalam meningkatkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Alokasi belanja daerah belum dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga peningkatan belanja daerah yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru dapat memperlebar distribusi pendapatan karena alokasi yang kurang tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

IPM memiliki pengaruh dalam menurunkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat dikatakan sebagai bentuk investasi. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat pada daerah tertinggal memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat menguasai teknologi modern. Teknologi nantinya berguna dalam hal peningkatan produktivitas atau efisiensi produksi. Aliran pendapatan yang lebih tinggi di masa akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Pendekatan dasar modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan.

Saran

Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur dapat meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharapkan adanya kebijakan yang ditujukan untuk dapat menciptakan pemerataan antar daerah. Misalnya, pengembangan UMKM yang potensial sesuai dengan karakteristik daerah, pembangunan sarana prasarana penunjang perekonomian pada daerah yang tertinggal.

Meningkatkan porsi alokasi belanja daerah pada pembangunan manusia dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas, terutama pendidikan. Misalnya pengembangan mutu pendidikan pada daerah terpencil, pemberdayaan dan pelatihan tenaga pengajar, pemberian beasiswa yang tepat sasaran, pengembangan fasilitas pendidikan terutama di desa dengan akses yang sulit, dan lain sebagainya.

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota dengan IPM yang rendah sehingga dapat mengurangi disparitas IPM. Penurunan disparitas IPM di Jawa Timur berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui tiga indikator dari IPM yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Gini Antar Provinsi di Indonesia*. <http://bps.go.id>, diakses 20 Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia Antar Provinsi di Indonesia*. <http://bps.go.id>, diakses 20 Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Antar Provinsi di Indonesia*. <http://bps.go.id>, diakses 20 Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik Seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur. 2016. *Realisasi Belanja Daerah*. <http://jatim.bps.go.id>, diakses tanggal 7 Januari 2017.
- Becker, Gary. S dan Luis Rayo. 2007. Evolutionary Efficiency and Happiness. *Journal of Political Economy*. Vol.1: 302-337
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

- Devarajan Shantayanan, Vinaya Swaroop, Heng-fu Zou. 1996. *The Composition of public Expenditure and Economic growth*. Journal of Monetary Economics. Vol.37: 313-344.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan pembangunan*, Jakarta: Bagian Penerbitan: LP3ES.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, Muhammad Harris. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jhngan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Laabas, Belkacem, dan Imed Limam. 2004. *Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth*. Paper prepared in the context of the IFPRI/API Collaborative Research Project.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik, edisi ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Midgley, James dan London Sage. 1998. Social Welfare in Global Context. *International Journal of Social Welfare*, Vol. 7 (No.1): 65-67
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nangaruba, Muara. 2011. *Analisis Deskriptif Ketimpangan Pendapatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nangarumba, Muara. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi, Belanja modal dan Investasi Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2005-2014*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Perotti, Roberto. 1994. Income Distribution and Investment. *European Economic Review*. Vol 38 : 827-835.
- Prasetya, Ferry, dan Farah Wulandary Pangestuty. 2012. *Linkages Between Public Sector Expenditure on Economic*. J. Basic. Appl. Sci. Res, 2(3)2347-2353, 2012
- Prastowo, Yustinus. 2014. *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Infid.
- Priambodo, Anugrah. 2015. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Roemer, John. E, dan Alain Trannoy. 2013. *Equality of Opportunity*. Cowles Foundation Discussion Paper No.1921.
- Rosmeli. 2014. *Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 9 (no.1).
- Saputro, Andi Tikno. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2010*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Shin, Inyong. 2012. *Income Inequality and Economic Growth*. Economic Modelling, Vol 29 : 2049-2057.

- Soeang, Edi, dan Lumban Gaol Haposan. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia
- Sudantoko, Djoko dan Hamdani Muliawan. 2009. *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mardi Mulya.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: Persada
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan ketiga*. Jakarta : Kencana.
- Sunan, Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduouse Media.
- Todaro, Michael P. dan Smith 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Alih Bahasa Drs Haris Munandar MA. Edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga.
- United Nations Development Program. *Human Development Report 1995*. <http://hdr.undp.org>, diakses 15 Novemer 2016.
- World Bank. 2015. *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. <http://worlbank.org>. diakses 10 Agustus 2016
- Zakariya, Ahmad. 2016. *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/kota di Jawa Timur*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.